Penggunaan Bahasa dalam Komunikasi Informasi Publik Pemerintah di Era Digital

Nama_1 Alfianita[1], Nama_2 Endang Sholihatin[2]
Institusi/lembaga Penulis [1]UPN "Veteran" Jawa Timur
Institusi / lembaga Penulis [2]UPN "Veteran" Jawa Timur
Alamat e-mail : nitalfiant@gmail.com
Alamat e-mail : endang.sholihatin.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

The importance of language use in delivering public information through government digital media motivates this study. In practice, there are still instances of ineffective language use that may affect public understanding of the information presented. This study aims to analyze the use of language in government social media, news editing, and the management of public information documents (DIP). The research method used is descriptive qualitative, with data collected through observation and documentation of social media captions, news texts before and after editing, and DIP. The results indicate that language used in social media tends to be communicative and concise, while in news and DIP it is more formal and administrative. The news editing process improves clarity and sentence effectiveness. In addition, the presentation of data in the form of bar charts helps simplify information, although clear language use is still required. Overall, the use of language in delivering public information is quite effective, but improvements are still needed in terms of clarity, effectiveness, and consistency of terms.

Keywords: language use, social media, public information

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi publik melalui media digital pemerintah. Dalam praktiknya, masih ditemukan penggunaan bahasa yang kurang efektif sehingga memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam media sosial pemerintah, penyuntingan berita, serta pengelolaan Dokumen Informasi Publik (DIP). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi terhadap caption media sosial, teks berita sebelum dan sesudah penyuntingan, serta data DIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa pada media sosial cenderung komunikatif dan ringkas, sedangkan pada berita dan DIP lebih bersifat formal dan administratif. Proses penyuntingan berita terbukti mampu meningkatkan kejelasan dan efektivitas kalimat. Selain itu, penyajian data dalam bentuk grafik batang membantu mempermudah pemahaman informasi, meskipun tetap memerlukan kejelasan dalam penggunaan bahasa. Secara keseluruhan, penggunaan bahasa dalam

penyampaian informasi publik sudah cukup efektif, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal kejelasan, keefektifan, dan konsistensi istilah.

Kata Kunci: penggunaan bahasa, media sosial, informasi publik

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi di era digital mendorong instansi pemerintah untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi publik. Media sosial menjadi salah satu media yang efektif karena mampu menjangkau masyarakat secara luas dan cepat. Melalui media sosial, pemerintah dapat menyampaikan berbagai informasi secara real time, mulai dari kegiatan, kebijakan, hingga layanan publik. Oleh karena itu, media sosial memiliki peran penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam proses penyampaian informasi tersebut, penggunaan bahasa menjadi aspek yang sangat penting. Bahasa yang digunakan harus mampu menyampaikan pesan secara jelas, efektif, dan mudah dipahami oleh masyarakat yang memiliki latar belakang yang beragam. Menurut kajian analisis wacana dari Teun A. van Dijk, bahasa dalam suatu teks tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun makna dan menyampaikan informasi secara terstruktur kepada pembaca. Oleh karena itu, ketepatan penggunaan bahasa menjadi faktor utama dalam keberhasilan komunikasi publik. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan dalam penggunaan bahasa pada media sosial pemerintah. Beberapa konten masih menggunakan kalimat yang terlalu panjang, kurang efektif, atau menggunakan istilah yang kurang familiar bagi masyarakat umum. Hal tersebut dapat memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Selain itu, dalam penyampaian informasi publik juga terdapat proses penyuntingan berita serta pengelolaan data Dokumen Informasi Publik (DIP) yang memerlukan ketelitian dalam penggunaan bahasa agar informasi tetap akurat, konsisten, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Berdasarkan hasil pengamatan

selama kegiatan di lingkungan Diskominfo, ditemukan bahwa penggunaan bahasa tidak hanya terdapat pada media sosial, tetapi juga pada proses penyuntingan berita serta pengelolaan data informasi publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa memiliki peran yang luas dalam mendukung penyampaian informasi publik yang efektif. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis penggunaan bahasa dalam media sosial pemerintah serta dalam proses penyuntingan berita dan pengelolaan data informasi publik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan bahasa serta mengetahui efektivitas bahasa dalam penyampaian informasi publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dalam penggunaan bahasa pada instansi pemerintah serta sebagai referensi dalam kajian linguistik terapan, khususnya yang berkaitan dengan komunikasi publik di era digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi publik secara mendalam, khususnya pada media sosial, berita, dan pengelolaan data informasi publik.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari konten media sosial dan website PPID yang dikelola oleh Diskominfo, berupa caption media sosial, berita sebelum dan sesudah penyuntingan, serta data Dokumen Informasi Publik (DIP). Data tersebut dipilih karena dianggap mampu merepresentasikan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi publik di lingkungan instansi pemerintah.

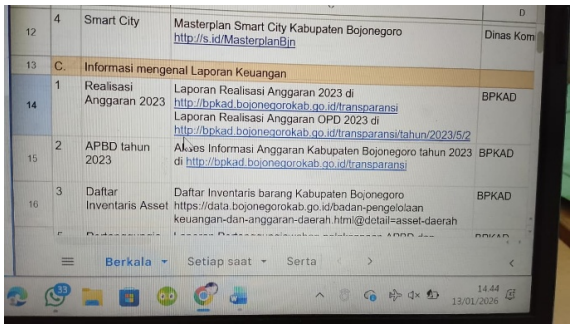
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara non-partisipatif, yaitu dengan mengamati secara langsung penggunaan bahasa dalam konten yang dipublikasikan tanpa terlibat dalam proses pembuatannya. Pengamatan difokuskan pada aspek kebahasaan seperti kejelasan kalimat, pemilihan kata (diksi), serta efektivitas penyampaian informasi. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa tangkapan layar (screenshot) dari konten yang dianalisis.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menganalisis penggunaan bahasa berdasarkan aspek kebahasaan. Data kemudian diinterpretasikan dengan mengacu pada kajian analisis wacana menurut Teun A. van Dijk serta konsep linguistik terapan untuk melihat bagaimana bahasa digunakan dalam konteks komunikasi publik.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi publik di lingkungan Diskominfo dapat dilihat melalui tiga kegiatan utama, yaitu pengelolaan Dokumen Informasi Publik (DIP), penyuntingan berita, dan pembuatan caption media sosial.

1. Pengelolaan Dokumen Informasi Publik (DIP)

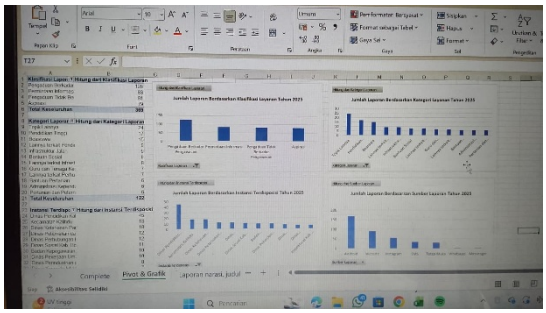


12	4	Smart City	Masterplan Smart City Kabupaten Bojonegoro http://s.id/MasterplanBjn	Dinas Kom
13	C.	Informasi mengenai Laporan Keuangan		
14	1	Realisasi Anggaran 2023	Laporan Realisasi Anggaran 2023 di http://bpkad.bojonegorokab.go.id/transparansi Laporan Realisasi Anggaran OPD 2023 di http://bpkad.bojonegorokab.go.id/transparansi/tahun/2023/5/2	BPKAD
15	2	APBD tahun 2023	Akses Informasi Anggaran Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 di http://bpkad.bojonegorokab.go.id/transparansi	BPKAD
16	3	Daftar Inventaris Asset	Daftar Inventaris barang Kabupaten Bojonegoro https://data.bojonegorokab.go.id/badan-pengelolaan keuangan-dan-anggaran-daerah.html#detail=asset-daerah	BPKAD

Gambar 1. Tabel DIP

Dokumen Informasi Publik (DIP) yang berisi jenis informasi, dasar hukum, konsekuensi, serta retensi waktu. Dalam pengelolaan data tersebut, penggunaan bahasa cenderung bersifat formal dan administratif.

Bahasa yang digunakan menekankan pada kejelasan istilah, seperti “informasi keuangan”, “daftar inventaris aset”, serta penggunaan rujukan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa dalam DIP tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bentuk dokumentasi resmi yang harus akurat dan tidak ambigu.

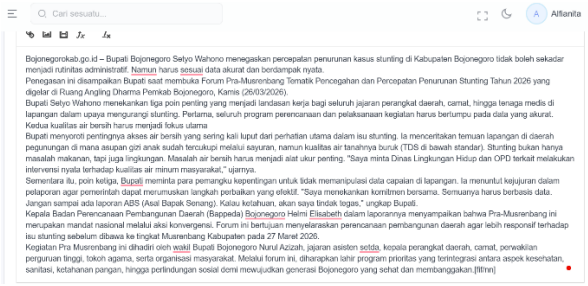


Gambar 2 hasil olahan data masyarakat dalam bentuk grafik batang

Selain itu, data yang berasal dari masyarakat juga diolah menjadi bentuk visual berupa grafik batang untuk mempermudah penyajian informasi. Grafik batang tersebut digunakan untuk menampilkan perbandingan jumlah data berdasarkan kategori tertentu, sehingga informasi lebih mudah

dipahami secara cepat dan ringkas. Penggunaan grafik ini membantu mengubah data yang bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan komunikatif.

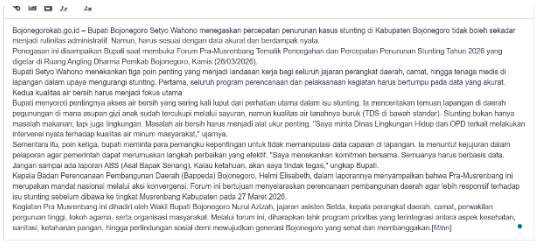
2. Penyuntingan Berita



Bojonegorokab.go.id – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan percepatan penurunan kasus stunting di Kabupaten Bojonegoro tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Namun, harus sesuai data akurat dan berdampak nyata.
Penegasan ini disampaikan Bupati saat membuka Forum Pra-Musrenbang Tematik Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 yang digelar di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Kamis (26/03/2026).
Bupati Setyo Wahono menekankan tiga poin penting yang menjadi landasan kerja bagi seluruh jajaran perangkat daerah, camat, hingga tenaga medis di lapangan dalam upaya mengurangi stunting. Pertama, seluruh program perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus bertumpu pada data yang akurat.
Kedua kualitas air bersih harus menjadi fokus utama
Bupati menyoroti pentingnya akses air bersih yang sering kali luput dari perhatian utama dalam isu stunting. Ia menceritakan temuan lapangan di daerah pegunungan di mana asupan gizi anak sudah tercukupi melalui sayuran, namun kualitas air tanahnya buruk (TDS di bawah standar). Stunting bukan hanya masalah makanan, tapi juga lingkungan. Masalah air bersih harus menjadi alat ukur penting. "Saya minta Dinas Lingkungan Hidup dan OPD terkait melakukan intervensi nyata terhadap kualitas air minum masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, poin ketiga, Bupati meminta para pemangku kepentingan untuk tidak memanipulasi data capaian di lapangan. Ia menuntut kejujuran dalam pelaporan agar pemerintah dapat merumuskan langkah perbaikan yang efektif. "Saya menekankan komitmen bersama. Semuanya harus berbasis data. Jangan sampai ada laporan ABS (Asal Bapak Senang). Kalau ketahuan, akan saya tindak tegas," ungkap Bupati.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Helmi Elisabeth dalam laporannya menyampaikan bahwa Pra-Musrenbang ini merupakan mandat nasional melalui aksi konvergensi. Forum ini bertujuan menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah agar lebih responsif terhadap isu stunting sebelum dibawa ke tingkat Musrenbang Kabupaten pada 27 Maret 2026.
Kegiatan Pra Musrenbang ini dihadiri oleh wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, jajaran asisten setda, kepala perangkat daerah, camat, perwakilan perguruan tinggi, tokoh agama, serta organisasi masyarakat. Melalui forum ini, diharapkan lahir program prioritas yang terintegrasi antara aspek kesehatan, sanitasi, ketahanan pangan, hingga perlindungan sosial demi mewujudkan generasi Bojonegoro yang sehat dan membanggakan.[ttlmn]

Gambar 3 Sebelum Disunting

perbandingan teks berita sebelum dan sesudah penyuntingan. Sebelum dilakukan penyuntingan, terdapat beberapa kesalahan penulisan seperti penggunaan huruf kapital yang tidak tepat (misalnya pada kata “Bupati”), serta penggunaan kata yang kurang efektif seperti “namun” di awal kalimat yang tidak diperlukan.



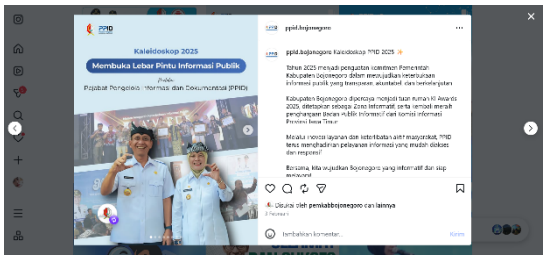
Bojonegorokab.go.id – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan percepatan penurunan kasus stunting di Kabupaten Bojonegoro tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Namun, harus sesuai dengan data akurat dan berdampak nyata.
Penegasan ini disampaikan Bupati saat membuka Forum Pra-Musrenbang Tematik Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 yang digelar di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Kamis (26/03/2026).
Bupati Setyo Wahono menekankan tiga poin penting yang menjadi landasan kerja bagi seluruh jajaran perangkat daerah, camat, hingga tenaga medis di lapangan dalam upaya mengurangi stunting. Pertama, seluruh program perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus bertumpu pada data yang akurat.
Kedua kualitas air bersih harus menjadi fokus utama
Bupati menyoroti pentingnya akses air bersih yang sering kali luput dari perhatian utama dalam isu stunting. Ia menceritakan temuan lapangan di daerah pegunungan di mana asupan gizi anak sudah tercukupi melalui sayuran, namun kualitas air tanahnya buruk (TDS di bawah standar). Stunting bukan hanya masalah makanan, tapi juga lingkungan. Masalah air bersih harus menjadi alat ukur penting. "Saya minta Dinas Lingkungan Hidup dan OPD terkait melakukan intervensi nyata terhadap kualitas air minum masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, poin ketiga, bupati meminta para pemangku kepentingan untuk tidak memanipulasi data capaian di lapangan. Ia menuntut kejujuran dalam pelaporan agar pemerintah dapat merumuskan langkah perbaikan yang efektif. "Saya menekankan komitmen bersama. Semuanya harus berbasis data. Jangan sampai ada laporan ABS (Asal Bapak Senang). Kalau ketahuan, akan saya tindak tegas," ungkap Bupati.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Helmi Elisabeth, dalam laporannya menyampaikan bahwa Pra-Musrenbang ini merupakan mandat nasional melalui aksi konvergensi. Forum ini bertujuan menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah agar lebih responsif terhadap isu stunting sebelum dibawa ke tingkat Musrenbang Kabupaten pada 27 Maret 2026.
Kegiatan Pra Musrenbang ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, jajaran asisten Setda, kepala perangkat daerah, camat, perwakilan perguruan tinggi, tokoh agama, serta organisasi masyarakat. Melalui forum ini, diharapkan lahir program prioritas yang terintegrasi antara aspek kesehatan, sanitasi, ketahanan pangan, hingga perlindungan sosial demi mewujudkan generasi Bojonegoro yang sehat dan membanggakan.[ttlmn]

Gambar 4 Sesudah Disunting

Setelah dilakukan penyuntingan, teks menjadi lebih sistematis dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perbaikan juga terlihat pada struktur kalimat yang lebih ringkas dan jelas.

Proses penyuntingan ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam berita sangat memengaruhi kualitas informasi yang disampaikan. Bahasa yang baik akan membantu pembaca memahami isi berita dengan lebih mudah dan mengurangi potensi kesalahpahaman.

3. Pembuatan Caption Media Sosial Instagram



Gambar 5 Caption Media Sosial IG

Pada gambar 5 ditunjukkan salah satu contoh konten media sosial yang digunakan untuk menyampaikan informasi publik. Dalam pembuatan caption, bahasa yang digunakan cenderung lebih komunikatif dibandingkan dengan bahasa pada DIP dan berita.



Gambar 6 Caption Media Sosial IG

Penggunaan kalimat yang singkat dan jelas menjadi ciri utama dalam caption media sosial. Hal ini bertujuan agar informasi dapat dengan cepat dipahami oleh masyarakat yang mengakses media sosial. Selain itu, caption juga disesuaikan dengan konteks visual agar pesan yang disampaikan lebih menarik.

Meskipun demikian, penggunaan bahasa dalam media sosial tetap mempertahankan unsur formal karena berasal dari instansi pemerintah.

D. Pembahasan

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi publik memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada media yang digunakan. Pada DIP, bahasa bersifat formal dan administratif; pada berita, bahasa harus informatif dan sesuai kaidah; sedangkan pada media sosial, bahasa lebih komunikatif dan ringkas. Jika dikaitkan dengan teori analisis wacana dari Teun A. van Dijk, penggunaan bahasa dalam ketiga bentuk tersebut menunjukkan adanya penyesuaian struktur bahasa sesuai dengan konteks komunikasi. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun pemahaman pembaca.

Secara keseluruhan, penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi publik di lingkungan Diskominfo sudah cukup baik, namun masih diperlukan perbaikan terutama dalam efektivitas kalimat dan konsistensi penggunaan istilah agar informasi dapat dipahami secara lebih luas oleh masyarakat.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi publik di lingkungan Diskominfo menunjukkan karakteristik yang berbeda sesuai dengan media yang digunakan. Pada pengelolaan Dokumen Informasi Publik (DIP), bahasa yang digunakan bersifat formal dan administratif dengan penekanan pada kejelasan serta ketepatan informasi. Penyajian data masyarakat dalam bentuk grafik batang turut membantu mempermudah pemahaman informasi, meskipun tetap memerlukan kejelasan dalam penulisan label dan keterangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Pada proses penyuntingan berita, ditemukan adanya peningkatan kualitas bahasa setelah dilakukan penyuntingan, baik dari segi struktur kalimat, pemilihan kata, maupun ketepatan penulisan. Sementara itu, dalam pembuatan caption media sosial, bahasa yang digunakan cenderung lebih komunikatif dan ringkas, namun tetap mempertahankan unsur formal sebagai bagian dari komunikasi instansi pemerintah.

Secara keseluruhan, penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi publik sudah cukup efektif, tetapi masih perlu ditingkatkan terutama dalam aspek kejelasan, keefektifan kalimat, dan konsistensi penggunaan istilah agar informasi dapat dipahami secara lebih luas oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar instansi pemerintah lebih memperhatikan penggunaan bahasa yang sederhana dan komunikatif tanpa mengurangi ketepatan makna, terutama dalam penyajian informasi kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan konsistensi dalam penggunaan istilah pada data dan informasi publik, termasuk dalam penyajian grafik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penggunaan bahasa dalam media digital pemerintah dengan pendekatan yang lebih mendalam, misalnya dengan melibatkan respon masyarakat terhadap tingkat pemahaman informasi yang disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Arifia, M. (2024). Kajian media sosial sebagai media strategis komunikasi hubungan masyarakat dalam institusi pemerintah. *Jurnal Communicative*, 5(2), 120-130.

Gunawan, I. (2017). *Metode penelitian kualitatif: teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Maulvi, H. R., & Sari, D. (2023). Peran media sosial dalam penyampaian informasi publik oleh pemerintah daerah. *Jurnal Komunikasi Publik*, 12(1), 45-53.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugraha, D. A., Prasetyo, B., & Rahmawati, N. (2024). Analisis isi konten media sosial pemerintah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi dan Komunikasi*, 8(1), 10-20.

Sari, N., & Prasetyo, A. (2020). Pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi publik pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 102-110.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tarigan, H. G. (2009). *Pengajaran analisis wacana*. Bandung: Angkasa.

Van Dijk, T. A. (2011). *Discourse studies: a multidisciplinary introduction* (2nd ed.). London: Sage Publications.

Yuliana, R., & Hidayat, A. (2022). Pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi publik pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 88-97.